

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS WEBSITE DALAM
MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* PROVINSI
SE-SUMATERA**

SKRIPSI



Nama : Pardi Sandi

NIM : 222016121

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS WEBSITE DALAM MENINGKATKAN *GOOD
GOVERNANCE* PROVINSI SE-SUMATERA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Pardi Sandi
NIM : 222016121

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pardi Sandi
NIM : 222016121
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Kosentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Dalam Meningkatkan *Good Governance* Provinsi Se-Sumatera

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



METERAI
TEMPEL
20684AHF597815320
6000
TUAS RUPIAH
Pardi Sandi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis
Website Dalam Meningkatkan *Good Governance* Provinsi Se-
Sumatera
Nama : Pardi Sandi
Nim : 222016121
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada, Juli 2020

Pembimbing I



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0206046303/784021

Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan

u.b Ketua Progam Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTO

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

(Q.S Ali - Imran : 159)

“Hidup terlalu singkat jika hanya mengkhawatirkan masa depan. Berdo’a dan berusaha, karena do’a punya kekuatan dan Allah selalu mendengarkan.”

(Pardi Sandi)

“Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin difitnah, semakin memaafkan. Semakin dihujat, semakin tenang.”(Prabowo Subianto)

**Terucap syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu Mendoakanku dan memberikan motivasi Bagiku**
- ❖ Keluargaku tercinta**
- ❖ Dosen Pembimbingku**
- ❖ Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan *good governance* provinsi se-sumatera, dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs.H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ayahku Asnawi. S.Pd.,SD dan ibuku Cik Nayu. S.Pd.,SD yang telah sangat berjasa dalam mendidik dan tidak henti mendoakanku setiap saat, memberikan nasihat dukungan moral maupun material.
7. Saudaraku yang selalu memberikan semangat, hiburan dan dukungan selama penulisan skripsi
8. Pasangan sekaligus calon makmumku Framita Indah Sari yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan apa yang diharapkan.
9. Sahabatku Ari, Rega, Dani, Aji, Raka, Windi, Romi yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

Pardi Sandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKARTA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN HIPOTESIS	11
A. Landasan Teori.....	11
1. <i>Good Governance</i>	11
a. Definisi <i>Good Governance</i>	11
b. Karakteristik <i>Good Governance</i>	11
2. Transparansi	18
a. Definisi Transparansi	13
b. Tujuan Transparansi	14
c. Instrumen Untuk Mewujudkan Transparansi	15
3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	15
a. Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah	15

b. Tahap – Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
B. Penelitian Sebelumnya	21
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Operasionalisasi Variabel	24
D. Data yang Diperlukan.....	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	27
1. Analisis Data	27
2. Teknis Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian	30
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	30
2. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	32
3. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat.....	34
4. Gambaran Umum Provinsi Aceh	36
5. Gambaran Umum Provinsi Lampung	37
6. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu.....	38
7. Gambaran Umum Provinsi Jambi	39
8. Gambaran Umum Provinsi Riau	40

9. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau.....	41
10. Gambarn Umum Provinsi Bangka Belitung	42
B. Pembahasan	44
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Sumatera.....	7
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	21
Tabel III.1 Daftar Website Resmi Pemprov di Sumatera	24
Tabel III.2 Operasonalisasi Variabel	24
Tabel.IV. Tahap Perencanaan dalam Indeks Transparansi	51
Tabel.IV.2 Tahap Pelaksanaan dalam Indeks Transparansi.....	52
Tabel IV.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam Indeks Transparansi...	53
Tabel IV.4Indeks Transparansi	54
Tabel IV.5 Skor Transparansi.....	55
Tabel IV.6 Hasil Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan.....	55
Tabel IV.7 Opini BPK.....	56
Tabel IV.8 Indeks Pembangunan Manusia.....	57
Tabel IV.9 Kinerja Pemerintah.....	58

ABSTRAK

Pardi Sandi/222016121/2020/Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Dalam Meningkatkan *Good Governance* Provinsi Se-Sumatera.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Dalam Meningkatkan *Good Governance* Provinsi Se-Sumatera. Tujuannya untuk mengetahui tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Se-Sumatera. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Sumatera masih sangat sedikit yaitu 15%. Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan tingkat transparansi tertinggi yaitu 46,67%. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung meendapatkan tingkat transparansi terendah yaitu 0%.

Kata kunci : Transparansi Pengelolaan Keuangan, *Good Governance*

Abstract

Pardi Sandi / 222016121/2020 / The Analysis of Transparency in Regional Government of Financial Management based on website in Improving Good Governance in Sumatra.

Formulation of the problem in this study was how the Transparency in Regional Government of Financial Management based on website in improving Good Governance in Sumatra. The aim of the study was to determine the level of transparency of the financial management in regional governments throughout Sumatra. This research was a descriptive research. The data that used in this study were secondary data, while the the method of collecting data in this study was documentation. The Techniques of analysis that used were qualitative and quantitative analysis. The results of the analysis showed that the average level of transparency of the financial management in regional government in Sumatra was still very low, namely 15%. The Provincial Government of Aceh received the highest level of transparency at 46.67%. Meanwhile, West Sumatra, Riau Islands and Bangka Belitung received the lowest level of transparency, namely 0%.


Keywords: Transparency of financial Management, Good Governance

PENGESAHAN

NO. 267 / Abstract / LBUMP / VIII / 20_20

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera adalah amanat UUD 1945. Pemerintah harus menjalankan segala kegiatan pemerintahan dengan baik dan bersih agar dipercaya oleh masyarakat. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Karenanya untuk mewujudkan *good governance* pada tahun 2008, disahkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang mana undang-undang tersebut merupakan *legal standing* bagi publik untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi publik, serta kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap. Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik.

Transparansi merupakan isu utama dalam pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik guna meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam rangka fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan

penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berakibat pemborosan. Untuk menjalankan

pemerintahan yang baik harus diikuti dengan adanya pemenuhan prinsip keterbukaan informasi , karena tujuan ketersediaan informasi publik ialah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka merupakan indikator utamapada penerapan transparansi pada website.

Governance merupakan suatu konsepsi pengelolaan organisasi dalam lingkup luas (*macro-organizational*) tidak seperti manajemen yang lebih berfokus pada internal organisasi saja (*micro-organizational*). *Governance* melibatkan institusi lain dan peran masyarakat untuk mengontrol organisasi agar transparan, akuntabel, efisiensi, efektif dan berkinerja tinggi (Mahmudi, 2016:28).

Good Governance adalah Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative (Mardiasmo, 2009:18).

Good Governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan public secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku Negara, masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta (Dedi, 2000:1).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina , 2003:14).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Transparansi adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bappenas RI dalam buku pedoman penguatan pengamanan program pembangunan daerah, Bappenas dan Depdagri 2002 transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik semakin ditegaskan dengan terbit Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dinyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik yang dimaksudkan adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait serta informasi mengenai laporan keuangan. Pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik juga ditekankan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana

korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-undang Pasal 283 Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun

atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut dengan *hyperlink*. Sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut *hypertext* (Yuhfizar, 2009:2).

Website adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. Website merupakan miniatur dan representasi dari perorangan, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan yang bersangkutan. Website memberikan informasi, gambaran, serta visualisasi orang/lembaga yang membuatnya. Website bisa dibuat dengan tujuan apa saja, tergantung pemiliknya apapun yang dimimpikan bisa dituangkan dalam bentuk website (Taufik, 2014:5)

Website merupakan sebuah halaman berisi informasi yang dapat dilihat jika komputer anda terkoneksi dengan internet. Dengan adanya website, semua orang didunia bisa mendapatkan dan mengelola informasi dengan berbagai sumber yang tersedia diinternet. Website sendiri saat ini bisa memuat berbagai macam media, mulai dari teks, gambar, suara, bahkan video (Wahana Komputer, 2010:1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini dokumendari setiap tahap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, Tahap Perencanaan : Ringkasan Dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Ringkasan Dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran, Ringkasan Dokumen RKA-SKPD, Ringkasan Dokumen RKA-PPKD, Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD, Ringkasan DPA SKPD dan DPA SKPD. Tahap Pelaksanaan : Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Pembiayaan Daerah, Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Ringkasan RKA Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan, SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban : Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPK RI.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Toni dan Khamisah (2016). Hasil penelitian secara keseluruhan, kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki tingkat transparansi yang cukup rendah. Hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi public menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan pemerintah daerah di Provinsi Lampung berada dalam kategori tidak cukup transparan (*insufficient*) karena memiliki indeks dibawah 20%.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irwan dan Syamsul (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rizki dan Darwanis (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :Rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah di Indonesia berdasarkan 224 Kabupaten/Kota yang diteliti adalah 10,85. Nilai tertinggi indeks transparansi keuangan daerah didapatkan oleh Kabupaten Natuna dengan nilai indeks transparansi keuangan daerah 71. Nilai terendah indeks transparansi keuangan daerah adalah 2,09. Nilai indeks transparansi keuangan daerah terendah didapatkan oleh 48 kabupaten/kota di Indonesia dari 224 kabupaten/kota di Indonesia yang dijadikan sampel. Kekayaan pemda memiliki hubungan yang sangat rendah dengan tingkat transparansi keuangan daerah yang diterima pemerintah kabupaten/kota. Opini BPK memiliki hubungan yang sangat rendah dengan tingkat transparansi keuangan daerah yang diterima pemerintah kabupaten/kota

Berikut ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang ada di website dapat dilihat pada tabel I.1 :

Tabel I.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Sumatera

No	Provinsi	Ada	Tidak Ada
1	Sumatera Utara	✓	
2	Sumatera Selatan	✓	
3	Sumatera Barat		✓
4	Aceh		✓
5	Lampung		✓

6	Bengkulu	✓	
7	Jambi		✓
8	Riau	✓	
9	Kepulauan Riau		✓
10	Kepulauan Bangka Belitung	✓	

Sumber : Penulis, 2020

Berdasarkan Tabel I.1 transparansi keuangan pemerintah daerah se-semutera belum sepenuhnya transparan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya 5 Provinsi yang memberikan informasi keuangan yang transparan kepada publik. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan, Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Jambi dan Kepulauan Riau belum memberikan informasi keuangan yang transparan. Sehingga melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan sanksi dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan *good governance*. Adanya keterbukaan ini, akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah yang terbuka sangatlah baik untuk dilaksanakan, pemerintah yang tidak transparan cenderung akan menuju kepada pemerintahan yang korup karena akan memudahkan bagi segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Dalam Meningkatkan *Good Governance* Provinsi Se-Sumatera”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan *good governance* Provinsi Se-Sumatera?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan *good governance* Provinsi Se-Sumatera.

D. Manfaat Masalah

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan *good governance* Provinsi Se-Sumatera.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan *good governance* Provinsi Se-Sumatera.

3. Bagi Almamter.

Hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan *good governance* Provinsi Se-Sumatera, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ely Siswanto. *Good University Governance: Prinsip dan Implementasi dalam Penggalan Pendapatan*. Penerbit: Gunung Samudera.
- Hendra Karianga. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Edisi Pertama. Cimanggis: Kencana.
- Irwan Taufiq Ritonga. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 20 No. 2
- Jazim Hamidi. 2012. *Teori & Hukum Perencanaan Perda*. Universitas Brawijaya: Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.
- Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat *Good Publik Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Luqman Hakim. 2013. *Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi*. Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Muhammad Rizki Alwahidi dan Darwanis. 2019. Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 4, No. 1. 153-161.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Sekaran, Uma. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. 2018. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Taufik Ginanjar. 2014. *Rahasia Membangun Website Toko Online Berpenghasilan Jutaan Rupiah*. Iffahmedia.
- Toni Nur Hardianto dan Nur Khamisah. 2016. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal TECHNOBIZ* Vol.3, No. 5, 25-30.
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahana Komputer. 2010. *Membangun Website Tanpa Modal*. Yogyakarta: Andi.
- Yuhefizar. 2009. *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla (CMS)*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.